



# UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA

## FAKULTAS HUKUM

Kampus I : Jl. Harsono RM No. 67 Ragunan Pasar Minggu, Jakarta Selatan 12140

Tlp: 021. 27808882, 27808121

Kampus II : Jl. Perjuangan Raya Marga Mulya Bekasi Utara Telp: 021. 88955882

### SURAT TUGAS

Nomor : ST/47-C/III/2020/FH-UBJ

Tentang

### **PELAKSANAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT PRODI ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAYA SEMESTER GENAP T.A. 2019/2020**

DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAYA

- Menimbang : Sehubungan dengan kegiatan pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat Dosen Tetap pada Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, maka dipandang perlu mengeluarkan Surat Tugas.
- Mengingat : 1. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.  
2. Undang-Undang No. 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen.  
3. Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.  
4. Undang-Undang No. 49 Tahun 2014 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.  
5. Program Kerja Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya Tahun Akademik 2019-2020.  
6. Kalender Akademik Universitas Bhayangkara Jakarta Raya T.A. 2019/2020.

### MENUGASKAN :

Kepada : **SRI WAHYUNI, SH., MH.**

- Untuk : 1. Melaksanakan tugas pengabdian kepada masyarakat oleh Dosen Tetap pada Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Semester Genap Tahun Akademik 2019-2020, sebagai Mitra dengan melaksanakan "Pelayanan Hukum secara Gratis di Masa Pandemi Covid-19", yang dilaksanakan sejak bulan Maret 2020 sampai sekarang di Perusahaan HeyLaw Indonesia.  
2. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat dilaksanakan sejak tanggal dikeluarkannya Surat Tugas ini.  
3. Melaporkan hasil kegiatan kepada Dekan Fakultas Hukum.  
4. Melaksanakan tugas ini dengan penuh tanggung jawab.

Selesai.

Ditetapkan di : Bekasi

Pada tanggal : 20 Maret 2020

Dekan Fakultas Hukum



**Dr. Ika Dewi Sartika Saimima, SH, MH, MM.**  
NIP. 2001450

Tembusan:  
- Arsip

## SURAT KETERANGAN

Nomor : 09.004/H-L/V/2020

Saya yang bertanda tangan di bawah ini menerangkan bahwa :

Nama : Sri Wahyuni, SH., MH.

NIK : 3172046207830003

Alamat: Jalan Tipar Cakung, RT 09/ RW 01, No.10, Sukapura, Jakarta Utara 14140.

Adalah nama diatas benar merupakan Mitra diperusahaan kami HeyLaw Indonesia, yang bersangkutan bergabung dengan perusahaan kami sejak bulan Maret 2020 sampai sekarang, serta melaksanakan Pelayanan Hukum secara Gratis di masa pandemi covid-19.

Demikian surat ini kami buat secara benar untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 07-05-2020



Dr. Awaludin Marwan, SH, MH, MA.

---

CEO of HeyLaw





## Detail Profile



Sri Wahyuni, S.H., M.H.

📍 Jakarta

KONSULTASI

Tentang

### Deskripsi

Seorang pakar praktisi advokat dibidang hukum dengan kekhususan Perdata, Bisnis dan Industri. Aktif sebagai anggota PERADI DPC Jakarta Utara. Aktif juga sebagai akademisi dan anggota Asosiasi Dosen Hukum Acara Perdata (ADHAPER), saat ini tergabung dalam Tim Penyusunan RUU Acara Perdata. Saat ini sebagai ketua koordinator mata kuliah Hukum Acara Perdata dan Hukum Perikatan di Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta. Saat ini menjabat sebagai Sekretaris di Perkumpulan LBH Ubhara Jaya. Aktif juga sebagai anggota Asosiasi Pengajar Hukum Keperdataan (APHK).





henry wardana

Online



Saya sebagai salah satu pengurus Pimpinan Cabang Serikat pekerja Rokok tembakau makanan minuman Kab/kota Bekasi mendapatkan Laporan Mengenai akan dilakukannya pemotongan Upah dari Anggota kami yang bekerja di Pt. DIAMOND Sukanda Djaya... Alasan perusahaan karena adanya penurunan order imbas dari Corona... Sistem pemotongan upahnya adalah Pertama, dikenakan no work no Pay, jadi nanti karyawan akan ada yg di Off kan bergantian dan gajinya akan dibayar proporsional(catatan bagi yg di offkan sebulan penuh perusahaaa akan memberikan upah 50%)...kedua bahwa semua karyawan akan dipotong upahnya 10-25%(tergantung besar upahnya), baik masuk full atau tidak tetap dipotong seperti ini..jadi akan ada double potongan... Perusahaan sudah membicarakan hal ini dengan serikat pekerja. dan

Mulai percakapan disini...







henry wardana

Online



dan gajinya akan dibayar proporsional (catatan bagi yg di offkan sebulan penuh perusahaan akan memberikan upah 50%)...kedua bahwa semua karyawan akan dipotong upahnya 10-25% (tergantung besar upahnya), baik masuk full atau tidak tetap dipotong seperti ini..jadi akan ada double potongan... Perusahaan sudah membicarakan hal ini dengan serikat pekerja, dan perusahaan menyatakan akan tetap memberlakukan hal ini walau ada penolakan... Pertanyaan nya jika perusahaan tetap melakukan pemotongan, bagaimana aspek hukumnya secara pidana dan perdata.... Terima kasih Bu

11:19 AM

Perusahaan beralasan pandemi corona ini termasuk Force majeure sehingga mereka bisa melakukan langkah-langkah pemotongan upah untuk keberlangsungan perusahaan

HW

11:21 AM

Mulai percakapan disini...







henry wardana

Online



Baik, bicara pemotongan upah 10-25%, maka kita perlu mengkaji perjanjian yg telah di sepakati dan di tandatangani pihak perusahaan dan pihak pekerja. Sebab perjanjian yg telah dibuat sah susah dgn pasal 1320 maka perjanjian tsb sah dan menjadi uu bagi para pihak yg membuatnya, asas pacta sunt servanda sehingga perjanjian tsb akan menimbulkan akan menimbulkan hak dan kewajiban bagi para pihak yang membuatnya, objek dari perjanjian adalah prestasi, sehingga ketika ada pandemi covid 19, pihak perusahaan mengeluarkan kebijakan pengurangan upah 10-25%, sehingga apa yg telah diperjanjikan tidak dapat dilaksanakan sbgmn mestinya. solusinya pihak pekerja dan pihak perusahaan bertemu untuk membahas perjanjian tsb, apakah krn pandemi covid 19 pemasukan perusahaan jadi berkurang dan hal ini mengakibatkan perusahaan tidak dapat menjalankan kewajiban atau prestasi seperti yg tertuang dalam perjanjian krn adanya force majeure, bicara force majeure maka

Mulai percakapan disini...







henry wardana

Online



objek dari perjanjian adalah prestasi, sehingga ketika ada pandemi covid 19, pihak perusahaan mengeluarkan kebijakan pengurangan upah 10-25%, sehingga apa yg telah diperjanjikan tidak dapat dilaksanakan sbgmn mestinya solusinya pihak pekerja dan pihak perusahaan bertemu untuk membahas perjanjian tsb, apakah krn pandemi covid 19 pemasukan perusahaan menjadi berkurang dan hal ini mengakibatkan perusahaan tidak dapat menjalankan kewajiban atau prestasi seperti yg tertuang dalam perjanjian krn adanya force majeure, bicara force majeure maka ada 2 absolut dan relatif, pandemi covid 19 masuk force majeure relatif yang artinya ketika pandemi covid 19 perusahaan hanya mampu membayar upah yg dikurangi 10-25 %, namun penundaan pembayaran sisa upah tsb dapat dilakukan setelah pandemi covid 19 ini berakhir atau ketika keuangan perusahaan mulai membaik, artinya perlu ada pembicaraan para pihak ttg perjanjian yg telah dibuat tsb.

1:43 PM

Mulai percakapan disini...

